

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau yang dihuni oleh bermacam-macam suku, ras, dan etnis yang berbeda-beda. Indonesia memiliki keunggulan potensi alamnya. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi sektor kepariwisataan. Kekayaan alam, dan keragaman Indonesia memiliki berbagai karakteristik berdasarkan kearifan lokal, sehingga memiliki peluang yang sangat tinggi dalam membangun kepariwisataan di Indonesia untuk lebih dikenal baik oleh Domestik maupun Mancanegara. Saat ini Indonesia mulai mewujudkan kawasan wisata di wilayah pedesaan yang memiliki potensi tinggi akan bentang alamnya.

Perkembangan pembangunan sektor pariwisata di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Desa wisata memberikan kebebasan bagi masyarakat desa untuk mengelola, dan memajukan desanya dengan kebudayaan atau kearifan lokal yang dimiliki desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatawan dijelaskan dalam pasal 5 bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendukung serta mendorong dalam pemerataan, dan kesempatan untuk berusaha dan memperoleh mamfaat dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang optimal diharapkan mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pengembangan serta pengelolaan pariwisata yang baik serta

terencana akan menghasilkan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat dengan melihat keuntungan yang telah dicapai dalam sektor pariwisata. Maka dari itu muncul motivasi dari setiap provinsi untuk mengembangkan pariwisata yang dimiliki setiap daerah.

Provinsi Bangka Belitung terutama Kabupaten Belitung memiliki keinginan untuk mengembangkan pariwisata yang ada untuk menjadi sektor unggulan. Kabupaten Belitung melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 telah menetapkan pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Belitung dengan tujuannya yaitu dalam pengelolaan pariwisata daerah yang berkualitas yaitu dengan mengembangkan daya tarik wisata melalui tingginya tingkat pemasaran, tingkat kompetensi serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata berbasis masyarakat. Perkembangan pariwisata lokal di Kabupaten Belitung terus mengalami perkembangan, dan perbaikan yang sangat signifikan. Banyak objek wisata baru yang wajib dikunjungi, Berdasarkan data jumlah kunjungan dalam lima tahun terakhir Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan kenaikan rata-rata 29.41 persentase pertahun. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2018 yaitu sekitar 467.571 orang hingga dengan 31 Desember 2018 yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 14.681 orang, dengan wisatawan domestik mencapai 452.890 orang. (Dispar.Belitungkab.go.id. 2019)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2015 - 2025

(RIPPARDA) digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan mengembangkan sektor pariwisata secara terstruktur, terpadu dan memiliki wawasan pembangunan berkelanjutan selain itu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Perda tersebut telah tegas memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh seluruh stakeholder kepariwisataan Kabupaten Belitung, tuntutan untuk saling bersinergi antar sektor, serta pembagian peran para pelaku pembangunan, untuk mencapai tujuan visi pembangunan kepariwisataan yang telah ditetapkan.

Desa Terong merupakan sebuah desa yang letaknya sangat strategis di jalur pelintasan pesisir pantai utara Pulau Belitung, dan jalur lintasan pariwisata Tanjung Pandan, Tanjung Kelayang, dan Tanjung Tinggi, Hal tersebut menjadikan Desa Terong turut menjadi objek wisata prioritas di Kabupaten Belitung. 17 Desember 2016 merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Desa Terong dikarenakan Desa Terong merupakan Desa Wisata pertama di Belitung yang ditandai dengan *Soft Launching* sebagai Desa Wisata “ Kreatif “ Terong di kawasan wisata Aik Rusa Berehun (ARB). Menurut Murphy (dalam Sunaryo, 2013) Partisipasi atau keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah. keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata memberikan dampak yang sangat positif. Pembangunan pariwisata pada dasarnya tidak dapat dijauhkan dari sumber daya, keunikan dari komunitas lokal, baik yang berupa bentuk fisik maupun non fisik, dan yang menjadi unsur pendorong utama dalam kegiatan pariwisata itu sendiri yaitu pariwisata dapat dilihat dari kegiatan yang berbasis pada komunitas setempat.

Desa Terong merupakan desa wisata memiliki potensi lokal yang kemudian dikembangkan oleh beberapa komunitas masyarakat. Kemudian pada tahun 2013 masyarakat Desa Terong mulai menggali potensi yang dimiliki. Desa Terong memiliki keindahan alam yang dikembangkan seperti wisata perbukitan, wisata kawasan agrowisata, wisata kawasan mangrove dengan pantai yang masih alami serta wisata buatan dari bekas lahan tambang timah dikelola, dan direklamasi sehingga menjadi kawasan wisata juga. Menurut Yoeti (dalam Primadany, 2013) pengembangan daerah wisata merupakan suatu usaha mengembangkan serta memajukan suatu potensi yang ada. Sementara itu untuk menunjang kegiatan pengembangan desa wisata, dibentuk oleh masyarakat sadar wisata oleh masyarakat Desa Terong yaitu terbentuk komunitas dalam pengembangan desa wisata dengan melihat peluang, dan potensi yang dimiliki.

Adapun komunitas-komunitas tersebut memiliki masing-masing fokus sesuai dengan ketertarikan bidang yang dilaksanakan selama ini. Terdapat empat komunitas yang berperan aktif yaitu, pertama Kelompok Bukit Tebalu Simpor Laki dengan produk wisata alam yaitu perbukitan, hiking dan bumi perkemahan yang terdiri dari 4 bukit dengan jejeran batu granit. yang kedua, kelompok Aik Rusa' Berehun yang memanfaatkan eks tambang timah, dengan produk kuliner lokal. Ketiga kelompok tani agrowisata perkebunan sayur, hasil pertanian akan memberikan dampak bagi perekonomian komunitas masyarakat dengan produk wisata edukatif bagi pelajar maupun umum dengan wisata minat khusus. Keempat, kelompok Pemuda Nelayan Pecinta Alam Terong, yang memanfaatkan hutan mangrove dan pantai yang landai dan sangat luas. Kemudian untuk melengkapi desa wisata masyarakat berpartisipasi

menyediakan rumah tempat tinggal mereka sebagai homestay, yang saat ini terdapat sekitar 24 homestay di Desa Terong. (Gemari.id, 2019)

Pada tahun 2017 Desa Terong mampu meraih peringkat delapan Desa Wisata kategori *Community Based Tourism* (CBT) tingkat Nasional oleh Kementerian Pariwisata. Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi Dan Pengembangan Masyarakat Kementerian Pariwisata RI memberikan apresiasi kepada pihak pengelola serta seluruh masyarakat Desa Terong yang telah berhasil menciptakan salah satu pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat dikarenakan Kabupaten Belitung ditetapkan menjadi 10 destinasi prioritas nasional. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar, sehingga bagi stakeholder (pemangku kepentingan) untuk bagaimana menangkap peluang tersebut bagi pariwisata di Kabupaten Belitung, dari 10 destinasi yang ada pengembangan Desa Wisata merupakan salah satu bukti bahwa sudah ada kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat serta seluruh stakeholder pariwisata yang terlibat. Dalam pembangunan pariwisata masyarakat mempunyai peran sangat penting apalagi Belitung telah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.

Keberhasilan yang telah dicapai dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat Dalam konsep Desa Wisata merupakan bentuk peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah Daerah Belitung merencanakan kebijakan setiap desa memiliki satu destinasi pariwisata sesuai dengan arahan Menteri Pariwisata tujuannya agar pariwisata bukan dikuasai oleh para investor ataupun para kapitalis tetapi harus dikuasai dan dikelola oleh rakyat. Bentuk dukungan pemerintah dalam pembangunan desa wisata terong ini tidak lepas dari peran penguatan kapasitas

masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Belitung berkeja sama dengan *Lokal Working Group* (LWG) atau kelompok pekerja lokal memiliki program *Destination Management Organisation* (DMO) melalui pendampingan dan pelatihan secara langsung kepada masyarakat. (Kemenpar.go.id. 2016)

Pengembangan destinasi desa wisata juga turut andil pihak swasta yang memiliki peran sebagai pihak yang menunjang keberhasilan dalam pengembangan desa wisata yaitu pihak swasta PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang meresmikan desa binaan dengan penandatanganan batu prasasti di wisata Aik Rusa Berehun sebagai desa binaan bakti BCA yang kegiatan tersebut merupakan salah satu tujuan untuk mendukung perkembangan pariwisata dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia khususnya Kabupaten Belitung. (Belitongbetuah.com.2019)

Permasalahan yang terjadi dalam tata kelola Desa Wisata Kreatif Terong Kabupaten Belitung yaitu belum berjalan sesuai dengan harapan, Hal ini terlihat dari persoalan mendasar yang menjadi kendala pengembangan Desa Wisata Kreatif Terong yaitu masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) kemudian pemerintah bertanggungjawab terhadap tata kelola desa wisata terong seharusnya dapat melakukan manajemen yang efektif, dan efisien terkait pelaksanaan dilapangan maupun pembagian tugas dengan para stakeholder, melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Belitung pemerintah berfokus pada kegiatan pendampingan, dan pelatihan. Sedangkan, dari pihak swasta juga melakukan hal yang sama terkait peningkatan SDM berupa pelatihan serta pendampingan, tujuan pemerintah, swasta dalam hal ini sudah terdapat sinkronisasi. Namun ketika pemerintah, swasta melakukan tindakan yang sama, maka menjadikan hal tersebut terkesan tidak efisien. Pemerintah, dan swasta seharusnya dapat melakukan

tindakan yang berkesinambungan, saling keterkaitan, berorientasi pada keberlanjutan agar pembangunan desa wisata terong dari segi fisik maupun intelektual dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta tidak hanya berfokus pada peningkatan SDM tetapi juga terkait pengembangan fisik dari desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu :

- 1. Bagaimana peran Stakeholder Dalam Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Wisata Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung ?*
- 2. Bagaimana pola hubungannya dalam perspektif collaborative governance ?*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu

1. untuk mengetahui bagaimana peran stakeholder dalam tata kelola desa wisata berbasis masyarakat Di Desa Wisata Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung ?
2. untuk mengetahui bagaimana pola hubungannya dalam perspektif *collaborative governance*”.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan mamfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan bahan referensi dan memperkaya kajian-kajian bagi akademisi khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan terutama tentang bagaimana peran stakeholder dalam tata kelola desa wisata berbasis masyarakat dan pola hubungannya dalam perspektif *collaborative governance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dalam dalam tata kelola desa wisata berbasis masyarakat dan pola hubungannya dalam perspektif *collaborative governance*.
- b. Bagi peneliti, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan rujukan pada penelitian selanjutnya
- c. Bagi masyarakat, yaitu dapat menambah wawasan kepada masyarakat mengenai tata kelola desa wisata berbasis masyarakat dan pola hubungannya dalam perspektif *collaborative governance*.

1.5 Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka atau literature review dari penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Judul	Penulis / Tahun/ Sumber	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
1.	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata (studi Kasus Di Desa bejiharjo, Kecamatan Karangmoj, Kabupaten Gunung Kidul, DIY)	Abdur Rohim /2013 / Sumber : Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.	Pengelolaan desa wisata dalam melakukan pemberdayaan pelaksanaan sudah sdangat baik. yaitu masyarakat sudah baik karena dalam pelaksanaannya . Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar desa wisata sudah tertata dengan matang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar wisata tersebut dapat memberikan mamfaatn baik segi sosial, budaya maupun ekonomi masyarakat	Dengan adanya pelaksanaan pemeberdayaan masyarakat menajdi lebih paham akan pengelolaan pariwisata.	Belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata.

			sekitar.		
2	“Strategi Tata Kelola Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur”	Handini Widiyanti / 2016 / Sumber : Tesis, Institut Pertanian Bogor.	Dalam tata kelola pengembangan ekowisata beberapa peran stakeholder ikut terlibat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat namun peran masyarakat tidak mendominasi dikarenakan peran pemerintah dan swasta yang mendominasi.	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekowisata alam	Kurangnya peran masyarakat dalam tata kelola pengembangan ekowisata alam tersebut.
3	Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara	Hadiwijaya Lesmana dan Dini Purbani / 2015 / Sumber : Jurnal Manusia dan Lingkungan, vol 22, no 3. hlm 380-387.	Dalam pengelolaan pengembangan wisata instansi dan sumber daya alam serta infromative belum terkoordinir dengan baik.	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar.	Kerjasama yang terjalin dalam pengembangan pariwisata antar pihak belum terjalin dengan baik.
4	Peran Ekowisata dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Pada Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Tangkiling Kalimantan	Soedigdo Doddy dan Yesser Priono / 2013 / Sumber : <i>Jurnal Perspektif Arsitektur</i> , 8(2).	Ekowisata dalam pemberdayaan berperan namun hanya secara pasif, selain itu terdapat beberapa factor yang	Masyarakat dibekali keahlian dalam pengembangan ekowisata sehingga dapat dijalankan dengan maksimal	Tidak semua masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

	Tengah		ada dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kota Batu.		
5	<i>Collaborative Governance</i> dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival.	Harmawan Nuari B, / 2017 / Sumber : E -Sospol ; Vol. Iv Edisi 1; Jan –Apr 2017; Hal 50 –55	Pola hubungan terbangun berbentuk <i>public privat partnership</i> dalam dalam kerja sama antar stakeholder sehingga terjalin komunikasi dalam membicarakan pandangan masing-masing pihak dalam pengembangan pelaksanaan sebuah event karnaval di Kabupaten Banyuwangi.	Terbentuknya komunikasi yang baik dikarenakan dalam membicarakan pendapat masing-masing adanya tatap mukanya secara langsung	belum terbentuk pola kerjasama yang stabil dan terstruktur.
6	Tata kelola pariwisata di kecamatan Buru kabupaten Karimun	Aminah, Dkk / 2016 / Sumber : Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung pinang.	Tata kelola pariwisata yang dilakukan di kecamatan buru kabupaten karimun yang dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan antara	Peran pemerintah dan masyarakat sangat menonjol dalam pengelolaan pariwisata di kecamatan tersebut.	Dalam tata kelola pariwisata di kecamatan buru peran swasta belum terlibat dan pengelolaan yang belum profesional serta pemberdayaan masyarakat yang minim

			pihak masyarakat, pemerintah dan swasta.		di tambah fasilitas sarana prasarana belum memadai.
7	“Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat” (Kasus Obyek Wisata Alam RammangRamma ng Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan)	Mauizatul Hasanah / 2017 / sumber : skripsi, Fisipol, Universitas Hasanuddin Makassar	pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat di dalam pengelolaannya kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan wisata serta keterbatasan anggaran sehingga dalam pengelolaannya kurang maksimal.	Adapun kelebihan pariwisata yang menonjolkan masyarakat yaitu mampu memperbaiki kehidupan masyarakat dan sumber daya manusia (SDM).	Kesadaran masih rendah terhadap pengelolaan pariwisata serta keterbatasan anggaran.
8	Pengembangan <i>Community Based Tourism</i> Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Sugi Rahayu / 2016 / sumber : Jurnal Penelitian Humaniora, 1- 13.	Bagaimana pengembangan <i>community based tourism</i> (CBT) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Pemerintah telah melakukan inovasi baru dalam pengelolaan obyek pariwisata berbasis masyarakat.	Partisipasi masyarakat yang masih kurang serta pembangunan infrastruktur yang belum memadai dan jalinan kemitraan yang belum maksimal.
9	Peranan dan Kebutuhan	Heri Santoso, Dkk / 2015 /	Peran masyarakat	Keterlibatan pemangku	Mamfaat pariwisata

	Pemangku Kepentingan Dalam “Tata Kelola Pariwisata di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara”	sumber : <i>Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 1</i> 2(3).	kurang mendonaminasi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat hanya peran pemerintah dan swasta yang menonjol dalam pengelolaan pariwisata tersebut.	kepentingan terjalin sangat baik dalam pengelolaan pariwisata tersebut.	tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat dikarenakan peran masyarakat kurang di libatkan
10	Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari dan Sambi Kabupaten Sleman.	Tri Sunu Yulianto / 2015 / sumber : Tesis, Program Studi Magister Perencana Kota dan Daerah, Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Dalam pengembangan pariwisata di desa wisata terdapat perbedaan yaitu modal sosial yang berbeda, peran serta, kelembagaan, dan manfaat memperlihatkan kondisi yang sangat berbeda.	Tingkat modal sosial yang dimiliki oleh kedua desa wisata tersebut sehingga dapat menjadi contoh dan memotivasi desa lainya agar mampu berkembang seperti desa wisata tersebut.	Kesadaran masyarakat di desa wisata pentingsari mengenai potensi wisata yang dimiliki masih rendah sehingga belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Dari tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa semua peneliti lebih cenderung lebih menganalisis tentang bagaimana partisipasi, dan keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, namun ada beberapa peneliti yang menganalisis tentang bagaimana tata kelola namun tidak dikaitkan dengan keterlibatan masyarakat setempat. Berbeda dengan penelitian terdahulu penelitian ini, dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis tata kelola yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di Desa Wisata

seperti peran pemerintah, swasta dan masyarakat dan pola hubungannya dalam persepektif *collaborative governance*, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sekarang dilakukan di Desa Wisata Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

1.6 Kerangka Dasar Teori

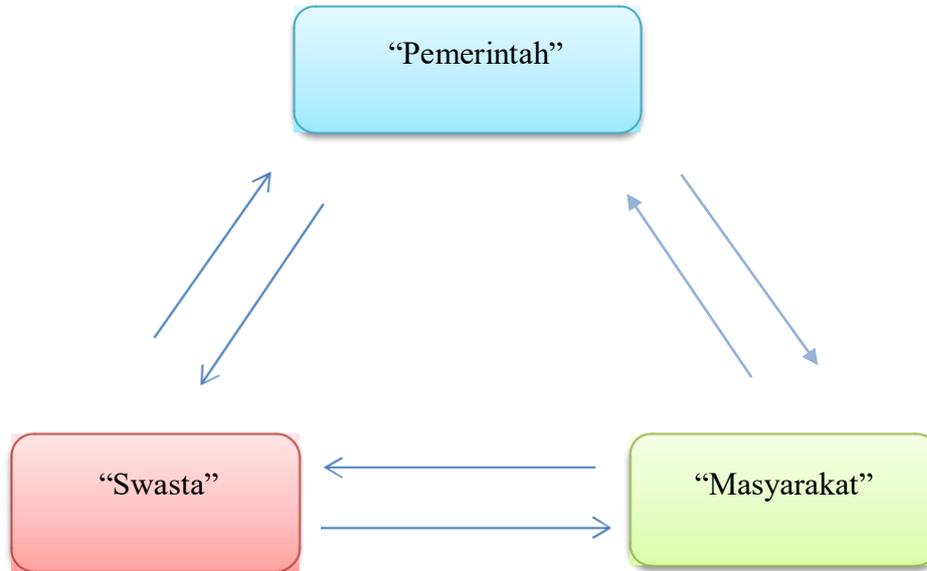
1.6.1 Collaborative Governance

a. Definisi Governance

Menurut Koiman (2009:273, dalam Merlin:2019), *governance* yaitu serangkaian proses interaksi sosial politik pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai bidang sesuai dengan kepentingan masyarakat, yang mempengaruhi pemerintah atas kepentingan tersebut. Menurut Rochman dalam (Merlin, 2019) *Governance* yaitu suatu mekanisme dalam pengelolaan sumber daya ekonomi sosial yang memberikan pengaruh kepada sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif.

Menurut Ulum, dan Ngindana dalam (Anshar, 2018) mengatakan bahwa *governance* “disesiminasi otoritas” dari *single actor* menjadi *multi-actor*. Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa dalam konsep *governance*, terdapat urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah sehingga dikelola bersama dengan beberapa stakeholder yaitu swasta dan masyarakat, sehingga dengan adanya *governance* peran pemerintah tidak lagi dominan sehingga menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan urusan publik.

Bagan 1.1 Aktor *Governance*



Sumber : Abidin dkk: 2013

Menurut Abidin dkk (2013:10) mengatakan terdapat beberapa stakeholder yang berpengaruh dalam proses *governance*. Adapun beberapa stakeholder tersebut yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga ketiga stakeholder tersebut saling berkolaborasi. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor yang berperan memonopoli dalam penyelenggaraan pemerintah, melainkan dalam penyelenggaraan pemerintah harus melibatkan aktor lain dikarenakan keterbatasan kemampuan pemerintah. Peran Swasta dengan kemampuan dan dukungan finansial yang dimiliki harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan keterlibatan multi aktor dalam *governance*, Ulum dan Ngindana dalam (Anshar, 2018) parameter penerapan konsep *governance* dalam 5 aspek sebagai berikut:

1. *Governance* yaitu “seperangkat institusi dan aktor yang diambil dari pemerintah maupun pihak di luar pemerintah”

2. *Governance* yaitu “mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial”
3. *Governance* yaitu “mengidentifikasi keterkaitan kekuatan dalam hubungan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif”
4. *Governance* merupakan jaringan aktor pemerintahan yang otonom.
5. *Governance* “mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan atau menggunakan otoritas pemerintah”

Dari beberapa parameter di atas menjelaskan bahwa *governance* harus mampu mengandalkan pihak lain selain pemerintah. *Governance* mengharuskan adanya kinerja yang kolektif antar stakeholder, sehingga hubungan antara aktor tersebut mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti permasalahan sosial ekonomi.

b. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi baik dari satu institusi ke institusi lain maupun dari satu pakar ke pakar yang lainnya. Namun prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas Sedarmayanti dalam (Merlin, 2019)

- 1) Transparansi

Transparansi merupakan kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

2) Partisipasi

Setiap orang memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan, dan aspirasi masing-masing. Partisipasi diperlukan dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

3) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan, dan warga Negara madani memiliki pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik atau stakeholder

c. Collaborative Governance

Ansell dan Gass dalam (Zaenuri, 2018) mendefinisikan tata kolaborasi sebagai tata kelola yaitu yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung yang melibatkan para pemangku kepentingan non negara dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah dengan tujuan membentuk seta mengimplementasikan suatu kebijakan publik ataupun dalam pengelolaan aset publik. Pada kerjasama dalam kolaboratif

masing-masing pihak diikat dengan kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah tertentu (Zaenuri, 2014)

Ansel dan Gash dalam (Dimas, 2018) mengatakan bahwa Collaborative Governance sebagai strategi baru yang digunakan dalam tata kelola pemerintahan yang membuat para pemangku kepentingan berkumpul menjadi satu dalam forum yang sama untuk membuat konsensus bersama.

Adrian Devine (2011) mengatakan bahwa manajemen sektor publik merupakan suatu bagian penting dalam kolaborasi. Lebih jauh dia berpendapat organisasi akan menjadi semakin umum di sektor publik maupun swasta dalam kolaborasi. Sedangkan menurut Agranoff dan Mc Guire dalam (Zaenuri, 2018) kolaboratif merupakan sebuah konsep yang menggambarkan suatu proses fasilitasi dalam beroperasi dengan rencana multi organisasi sebagai tujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan sebuah masalah dengan organisasi tunggal (*single organization*).

Selanjutnya Dwiyanto dalam (Zaenuri, 2018) mendefinisikan manajemen kolaborasi yaitu sebuah praktek manajemen yang saling menghargai keragaman nilai, tradisi, budaya organisasi, bekerja dalam struktur yang relatif longgar dan berbasis pada jaringan yang dikendalikan oleh nilai-nilai dan tujuan bersama, serta memiliki kapasitas mengelola konflik.

Selanjutnya Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* yaitu suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan

keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. Afful-Koomson dan Kwabena dalam (Irawan, 2017).

Adapun model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash dalam (Harmawan, 2017) sebagai berikut:

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap *starting condition* dalam relasi antar stakeholder yaitu stakeholder memiliki latar belakang berbeda sehingga menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Ryan dalam Ansell dan Gash (2007:12) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan dalam kolaborasi yaitu:

- a. “manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi”
- b. “pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis”
- c. “memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor”

3. *Desain Institusional*

Menurut Ansell dan Gash (2007: 13) menjelaskan bahwa Desain institusional mengacu pada protokol dasar atau aturan-aturan dasar dalam kolaborasi secara kritis yang sangat ditekankan yaitu legitimasi prosedural dalam

proses kolaborasi. proses kolaborasi yang harus ditekankan yaitu pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

4. Proses Kolaborasi

Model proses (*Collaborative Process*) kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi yaitu *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan dalam membentuk kolaborasi yaitu:

- a. Dialog tatap muka (*Face to face*).
- b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).
- c. Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*).
- d. *Share Understanding*.

Dari segi konsep, *collaborative governance* dapat didefinisikan sebagai bentuk baru dari proses tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungan kerja satu sama lain melalui dialog rutin dan interaksi dalam mengejar tujuan bersama. (Innes dan Booher, 2004: Huxham, Zaeunuri 2018)

1.6.2 Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam peningkatan penghasilan, penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sector-sektor produktivitas lainnya.

Sedangkan menurut Oka A. Yoety, Pariwisata merupakan suatu pengalaman mengunjungi atau mendatangi suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian serta kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial dan budaya alam. Beberapa pengertian mengenai pariwisata menurut para ahli:

- 1) Menurut Sunaryo (2013: 2) di dalam UU Nomor. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, “pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”
- 2) Selain itu, menurut WTO atau *World Tourism organization* dalam (Muljadi, 2010: 8) pariwisata merupakan kegiatan yang dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dan tinggal ditempat lain selain lingkungannya yang tidak lebih dari satu tahun seperti untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lainnya.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata adalah kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ke suatu tempat yang keluar dari tempat tinggal biasanya dengan tujuan untuk kesenangan ataupun keperluan lainnya.

b. Kriteria Pariwisata

Menurut Yoeti dalam (Merlin, 2019) pariwisata memiliki empat kriteria, yaitu:

- 1) Perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ketempat yang berbeda, perjalanan tersebut dilakukan bukan di tempat orang tersebut biasanya tinggal.
- 2) Tujuan perjalanan adalah untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di Negara ataupun kota yang dikunjungi.
- 3) Wisatawan menggunakan uang yang dibawa dari negara asalnya yang digunakan untuk keperluan belanja, dimana dia biasa tinggal dan bukan hasil yang diperoleh dari perjalanan wisata yang dilakukan.
- 4) Perjalanan yang dilakukan wisatawan minimal 24 jam atau

lebih c. Bentuk-Bentuk Pariwisata

Menurut Yoeti dalam (Jegen, 2018) bentuk pariwisata di kelompokkan menjadi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Tujuan yaitu pariwisata budaya, pariwisata rekreasi, pariwisata sosial, pariwisata olahraga, pariwisata politik, pariwisata kesehatan dan pariwisata keagamaan.
- 2) Berdasarkan Letak Geografi, yaitu pariwisata regional, pariwisata lokal, nasional tourism, regional international tourism, international tourism.
- 3) Berdasarkan pengaruh terhadap neraca pembayaran yaitu pariwisata aktif adalah kegiatan pariwisata dengan masuknya wisatawan asing ke dalam suatu Negara tertentu sehingga mendatangkan devisa. Sedangkan pariwisata pasif adalah keluarnya penduduk ke suatu Negara lain untuk melakukan kegiatan kunjungan sehingga mengurangi cadangan devisa.
- 4) Menurut alasannya yaitu seasional tourism adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, occational tourism (kegiatan pariwisata yang dilakukan menurut kejadian atau event-event tertentu).

1.6.3 Desa Wisata

Menurut Fitriana dalam (Tajudin, 2018) yang dimaksud dengan Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata

ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan.

Pengembangan untuk menjadi desa wisata harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kelembagaan desa wisata, perlu perencanaan awal yang tepat dalam penentuan kegiatan khususnya pada kelompok sadar wisata agar mampu meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan desa wisata seperti pelatihan tata boga dan tata home stay, pembuatan cinderamata, pelatihan pemandu yang di dalamnya menjadi instruktur dalam outbound.
- b. Objek dan daya tarik wisata, perlu perencanaan yang baik dari masyarakat sebagai tuan rumah bagi wisatawan yang datang sehingga mampu mendatangkan wisatawan 7 dan mengemas produk wisata yang dimiliki serta perlu sosialisasi dari instansi terkait dalam menggalakkan pesona dan paket wisata terpadu.
- c. Sarana dan prasarana, pemerintah perlu mengarahkan dalam pengembangan sarana prasarana wisata seperti alat-alat outbound, cinderamata khas setempat dan rumah makan bernuansa pedesaan.

Komponen utama dalam pengembangan desa wisata diantaranya sebagai atraksi, akomodasi, masyarakat, infrastruktur, fasilitas pendukung pengembangan desa wisata, dan adanya mitra kerjasama baik dengan Dinas dan dengan lembaga atau institusi lainnya.

1.6.4 Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)

a. Pengertian Pariwisata Berbasis Masyarakat

Menurut Baskoro, BRA dalam (Merlin, 2019) mengatakan bahwa *Community Based Tourism* (CBT) adalah suatu konsep yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat/komunitas agar lebih mampu memahami nilai-nilai dan aset yang dimiliki, seperti adat istiadat, gaya hidup, kebudayaan, dan masakan kuliner. Komunitas tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk pengalaman berwisata.

Menurut (Mudana, 2015) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya local dan meningkatkan kualitas aktivitas pariwisata yang berkelanjutan. Konsep yang menjabarkan mengenai peran komunitas dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah menjadikan masyarakat asli daerah tersebut sebagai aktor utama melalui pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mempromosikan potensi wisata yang ada, seperti keindahan alam dan budaya.

b. Ciri-ciri Pariwisata Berbasis Masyarakat

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat adalah dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Nasikun dalam (Sastrayuda, 2010:3) mengemukakan ciri-ciri dan jumlah karakter dalam pengembangan pariwisata. sebagai berikut:

Pariwisata berbasis masyarakat memiliki ciri-ciri yang unik dan karakter yang berbeda dalam suatu organisasi

1) Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti dan ciri-ciri unik dan karakter yang lebih unik diorganisasi dalam skala yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional.

2) Pariwisata berbasis masyarakat komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal. 3) Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata konvensional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

c. Prinsip-prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat

Beberapa ahli mengatakan pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* memiliki prinsip-prinsip dasar, menurut UNEP dan WTO dalam (Rahayu, 2016) terdapat sepuluh prinsip dari pariwisata berbasis masyarakat yaitu: (1) Pertama, mengembangkan kepemilikan komunitas, mengakui, dan mendukung dalam industry pariwisata, (2) Kedua, dalam memulai setiap aspek melibatkan seluruh

anggota komunitas,(3) Ketiga, mengembangkan kualitas hidup komunitas, (4) Keempat, mengembangkan kebanggaan komunitas, (5) Kelima, dapat menjamin keberlanjutan lingkungan, (6) Keenam, tetap mempertahankan karakter, keunikan dan budaya di lokasi tersebut, (7) Ketujuh, turut membantu komunitas dalam perkembangan pembelajaran mengenai pertukaran budaya, (8) Kedelapan, dapat menghormati martabat manusia dan perbedaan budaya, (9) Kesembilan, keuntungan dari kegiatan pariwisata didistribusikan secara adil kepada anggota komunitas, (10) Kesepuluh, turut berperan dalam dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyekproyek yang terdapat dikomunitas.

Menurut Sunaryo dalam (Merlin, 2019) Pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* berkaitan dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat setempat untuk pembangunan kepariwisataan. Dalam pariwisata, terdapat dua perspektif dalam partisipasi masyarakat, yaitu dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan hasil yang didapat oleh masyarakat dari pengembangan pariwisata. Strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau *community based tourism*, memiliki tiga prinsip pokok, yaitu:

- 1) Manfaat kegiatan kepariwisataan bagi masyarakat *local*
- 2) Melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan

3) Masyarakat *local* dibekali dengan pendidikan kepariwisataan

Bedasarkan penjabaran diatas, memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Didalam pariwisata berbasis masyarakat, komunitas adalah aktor utama sebagai pengelola pariwisata dan bertujuan untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Menurut Hadiwijoyo dalam (Novia, 2014:478) agar pelaksanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat dapat berhasil dengan baik, terdapat elemen-elemen yang harus diperhatikan yaitu:

1) Sumberdaya alam dan budaya

- a) Sumber daya alam terjaga dengan baik
- b) Ekonomi local dan modal produksi tergantung keberlanjutan pengguna sumberdaya
- c) Kebudayaan yang unik sebagai tujuan

2) Organisasi - organisasi masyarakat

- a) Masyarakat berbagai kesadaran, norma dan ideologi
- b) Masyarakat memiliki tokoh yang dituakan yang mengerti akan tradisi lokal dan pengetahuan serta kebijakan setempat

- c) Masyarakat memiliki rasa saling memiliki dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh mereka sendiri

3) Manajemen

- a) Masyarakat memiliki aturan dan peraturan untuk lingkungan, budaya dan manajemen pariwisata
- b) Organisasi local atau mekanisme yang ada untuk mengelola pariwisata dengan kemampuan untuk menghubungkan pariwisata dan pengembangan masyarakat
- c) Keuntungan didistribusikan secara adil bagi masyarakat
- d) Keuntungan dari pariwisata memberikan kontribusi terhadap dana masyarakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat

4) Pembelajaran (*learning*)

- a) Membina proses belajar bersama antara tuan rumah dan tamu
- b) Mendidik dan membangun pemahaman tentang budaya dan cara hidup yang beragam
- c) Meningkatkan kesadaran konservasi alam dan budaya di kalangan wisatawan dan masyarakat setempat

1.7 Definisi Konseptional

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Collaborative governance* yaitu pengaturan pemerintahan dengan melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik.
2. Pariwisata merupakan industri baru yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam peningkatan penghasilan, penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sector-sektor produktivitas lainnya.
3. Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan yang mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan.
4. Pariwisata Berbasis Masyarakat merupakan konsep yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat agar dapat mengetahui potensi wisata yang dimiliki didaerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

1.8 Definisi Operasional

Defenisi operasional pada penelitian ini yaitu suatu unsur untuk mendukung dari definsi konseptual. Dimana pada definisi operasional ini ialah variable yang peneliti gunakan diantaranya:

Tata Kelola desa wisata berbasis masyarakat dalam Perspektif

Collaborative Governance

Tabel 1.2

Table Indikator Definisi Operasional

Indikator	Parameter
<p>1. <i>Starting Condition</i> (Kondisi Awal)</p> <p>2. Kepemimpinan Fasilitatif</p>	<p>a) Keterkaitan Stakeholder</p> <p>b) manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi.</p> <p>c) Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis.</p> <p>d) memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.</p>
<p>3. <i>Desain institusional (institutional design) dan</i></p>	<p>a) Pemerintah harus terbuka dan inklusif.</p>
<p>4. Proses kolaborasi (<i>Colaborative Governance</i>)</p>	<p>a) Dialog tatap muka (<i>Face to face</i>)</p> <p>b) Membangun Kepercayaan (<i>Trust Building</i>)</p> <p>c) Komitmen terhadap proses (<i>Comitment to process</i>) dan</p> <p>d) Pemahaman bersama (<i>Share Understandin</i>)</p>

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dikarenakan metodologi kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau dengan kata lain bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Sesuai dengan penelitian saya ini yaitu mencari data yang berupa kata-kata tertulis ataupun tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati kemudian mendeskripsikan, mencatat serta menganalisis dan menginterpretasikan tentang bagaimana peran stakeholder dalam tata kelola desa wisata berbasis masyarakat, dan pola hubungannya dalam perspektif *collaborative governance*.

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik ataupun cara kuantifikasi lainnya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah di Desa Wisata Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Lokasi ini diambil untuk mempermudah peneliti dalam mencari data selain itu melibatkan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Desa Wisata Terong adalah Pengelola setempat dan Salah satu pihak swasta yang dilibatkan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Bank BCA yang berlokasi di Kota Tanjung Pandan dan pihak pemerintah yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.

1.9.3 Unit Analisis Data

Unit analisa adalah focus atau komponen yang akan diteliti peneliti untuk mendapatkan data. Kemudian untuk menentukan subjek dan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Arikunto: 2010) informan atau narasumber dengan maksud tertentu sesuai dengan tema penelitian karena narasumber tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti. Maka dari itu unit analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Desa Wisata Terong mencakupi Pengelola desa wisata terong dan pihak-pihak yang terlibat dalam desa wisata, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung dan pihak dari Bank BCA.

Table 1.3
Daftar Subjek Penelitian

No	Unit Analisis Data	Sampel Penelitian
1.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung	Kepala Dinas pariwisata dan Kabag Terkait
2.	Bank BCA (swasta)	Pihak Terkait
3.	Masyarakat	Pihak terlibat

1.9.4 Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan menyusun penelitian ini adalah antara lain:

- a. Sumber Data Primer diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara dari sumber pertama yang berupa keterangan atau fakta-fakta. Adapun data primer yang dibutuhkan peneliti untuk bisa mendapatkan data secara langsung yaitu dengan mengajukan pertanyaan :

Table 1.4
Tabel Data Primer Penelitian

No	Unit Analisis Data	Sampel Penelitian	jumlah
1.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung	1. Kepala Dinas pariwisata (Jasagung Hariyadi) 2. Sekretaris Dinas Pariwisata (annyta) 3. Kepala bagian destinasi wisata (Susanto) 4. Kasi destinasi wisata (Natasha)	4
2.	Bank BCA (swasta)	Jeky Norton Maheui	1
3.	Masyarakat Desa Terong	1. Iswandi 2. Fajar 3. Susanti 4. Horiho 5. Buni	5
Total			10

- b. Sumber Data Sekunder Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari adanya penelitian adalah untuk memperoleh data. Didalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara Penelitian, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh data yang diperoleh dari narasumber. Di dalam proses wawancara selain mendengarkan dan menulis, peneliti juga dapat merekamnya. Dalam wawancara yang akan dilakukan nanti peneliti ingin mengetahui bagaimana Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Collaborative Governance di Desa Wisata Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, pihak Bank BCA, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Desa Wisata Terong Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
- b. Dokumen atau Bahan Pustaka, menurut Sugiyono (2017:224) penelitian ini melakukan pengumpulan data, membaca, dan mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan masalah atau objek yang diteliti.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dimana bentuk analisis yang dilakukan adalah dengan menggambarkan, dan menganalisa data sehingga dapat memberikan informasi serta dapat memberikan pemahaman terkait dengan pokok permasalahan secara rinci dan juga sistematis. Kemudian data yang diperoleh akan digambarkan menggunakan kata-kata ataupun kalimat sehingga didapat sebuah kesimpulan, data yang diperoleh merupakan data yang didapatkan melalui teknik wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut akan dikaitkan dengan menggunakan dasar teori yang sudah ada. Adapun tahap-tahap teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Reduksi data

Dalam tahapan reduksi data peneliti memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting dalam penelitian. Kemudian melakukan analisis manajemen, menggolongkan, mengarahkan penelitian terhadap indikator-indikator yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga dapat mendukung dalam melakukan penelitian.

2. Penyajian data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, data yang sudah disusun, dan dikelompokkan adalah data-data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya hasil data penelitian akan diolah dan disusun menjadi sebuah laporan secara sistematis serta terperinci agar dapat menggambarkan, dan

mendiskripsikan sesuai dengan kejadian ataupun fenomena yang telah terjadi sehingga lebih mudah untuk dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Tahapan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Penarikan kesimpulan ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh yang telah di reduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, serta memilah data yang mengarah pada permasalahan dan tanggung jawab dalam permasalahan yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang valid. (Hartadi, 2017)